

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pengelolaan BUMDes berdasarkan regulasi yakni kesesuaian pengelolaan BUMDes dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dan menganalisis substansi transaksi pembiayaan Qardh di unit usaha Bank Desa berdasarkan hukum syariah. Penelitian ini juga menjelaskan mengenai pengelolaan BUMDes berdasarkan kearifan lokal yang berarti pengelolaannya berdasarkan nilai-nilai lokal yang ada dalam masyarakat. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur. Hasil penelitian dibagi menjadi 3 poin utama, yaitu: pengelolaan BUMDes Pengalangan Sejahtera, analisis transaksi pinjaman Qardh dan model pembiayaan kepada masyarakat. Pembiayaan Qardh di bank desa menggunakan dua akad dalam satu transaksi (Qardh dan ijarah) tidak sesuai dengan hukum Islam karena bank desa mewajibkan jasa penitipan jaminan dalam transaksi Qardh adalah riba yang dibungkus hutang dan jasa. Penelitian ini menunjukkan bahwa BUMDes Pengalangan Sejahtera membutuhkan suatu model pembiayaan syariah kepada masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi BUMDes tanpa melanggar prinsip syariah.

Kata Kunci: Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Kearifan Lokal, Keuangan Islam, Pengelolaan Qardh.

Abstract

The research aims to analyze BUMDes management model based on regulation, namely the suitability of management BUMDes with Permendesa Number 4 of 2015 and analyze the substance of Qardh financing transactions in the Village Bank business unit based on sharia law. This research also explains the management of BUMDes based on local wisdom, which means that management is based on local values in the community. This descriptive qualitative research employs primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature studies. The results of the study are divided into 3 main points, i.e.: management of the BUMDes Pengalangan Sejahtera, analysis of Qardh loan transactions and financing model for the community. Qardh financing in village bank uses two contracts in one transaction (Qardh and ijarah) not in accordance with Islamic law because the village bank requires safekeeping services in Qardh transactions are usury wrapped in debt and services. The research also shows that BUMDes Pengalangan Sejahtera needs a model of Islamic finance to the community that can generate profits for BUMDes without violating sharia principles.

Keywords: *Management of BUMDes, Local Wisdom, Islamic finance, Management of Qardh.*